

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA KORPORASI SAPI DI KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Imelda Delima Anggraeni¹, Edwar Juliarta², Faizal Daud³, Suandi⁴, Abdul Rauf⁵

^{1),2),4)} Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti, Palembang

⁵⁾ Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti, Palembang

³⁾ Universitas Muhammadiyah, Palembang

Email : emaildad5@gmail.com¹, edwar_juliarta@unisti.ac.id², faizal_daud@unisti.ac.id³,
suandi@unisti.ac.id⁴, abdul_rauf@unisti.ac.id⁵

ABSTRACT

The Cattle Corporation Village (DKS) program is a government policy aimed at developing livestock farming based on a farmer-corporate model, with the objectives of increasing beef production, strengthening livestock economic institutions, and improving community income and welfare. This study aims to analyze the implementation of the DKS program in Air Kumbang District, Banyuasin Regency, South Sumatra Province; identify supporting and inhibiting factors; and explain the program's benefits to the community. A qualitative approach was employed, utilizing George C. Edward III's policy implementation framework, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Nine informants participated in the study, representing local government, cooperatives, facilitators, livestock farmer groups, agricultural extension workers, and the community. Data were collected through interviews, observations, document studies, and media reviews, and subsequently analyzed via data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The results indicate that selecting Air Kumbang District as the program site was appropriate, given its livestock potential and the presence of oil palm plantations. Communication among stakeholders occurred through visits, training sessions, coordination meetings, and digital channels, although communication from group members to supervisors requires further strengthening. Financial resource support from members was adequate, whereas human resource quality required improvements in managerial capacity. Implementers demonstrated a positive disposition, evidenced by the commitment of the village, government, cooperatives, facilitators, and farmer groups. An institutional structure was established through the Dekopi Aka Jaya Cooperative. However, implementation has not yet optimally achieved the goal of becoming a beef production hub due to issues such as livestock health, partial failure of artificial insemination, limited market networks, road conditions, seasonal feed availability constraints, and the lack of success in utilizing oil palm fronds as feed. Nevertheless, the program continues to deliver economic and social benefits, including increased income, the use of cattle manure as organic fertilizer, strengthened cooperation, and the potential for cost reductions in plantation operations. Strengthened mentoring, management training, livestock health, feed, marketing, and continuous oversight are required to ensure the program becomes more self-reliant and sustainable.

Keywords: *Program Implementation, Cattle Corporation Village, Farmers, Cooperatives, Air Kumbang District.*

ABSTRAK

Program Desa Korporasi Sapi (DKS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pengembangan peternakan berbasis korporasi petani yang diarahkan untuk meningkatkan produksi daging sapi, memperkuat kelembagaan ekonomi peternak, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Desa Korporasi Sapi di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menjelaskan manfaat program bagi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian berjumlah sembilan orang

yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, koperasi, pendamping, kelompok peternak, penyuluh pertanian, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan media review, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan Kecamatan Air Kumbang sebagai lokasi program pada dasarnya tepat karena memiliki potensi peternakan dan kawasan perkebunan kelapa sawit. Komunikasi antar pihak berjalan melalui kunjungan, pelatihan, rapat koordinasi dan komunikasi melalui media digital, walaupun komunikasi dari anggota kelompok kepada pembina masih perlu diperkuat. Dukungan sumber daya finansial anggota cukup baik, sedangkan kualitas sumber daya manusia masih membutuhkan penguatan kapasitas manajerial. Disposisi pelaksana tergolong baik dan ditunjukkan melalui komitmen desa, pemerintah, koperasi, pendamping, serta kelompok peternak. Struktur kelembagaan melalui Koperasi Dekopi Aka Jaya juga telah terbentuk. Namun, implementasi belum mencapai tujuan sebagai sentra produksi daging secara optimal karena masalah kesehatan ternak, kegagalan sebagian inseminasi buatan, keterbatasan jaringan pasar, kondisi jalan, fluktuasi ketersediaan pakan akibat musim, dan belum berhasilnya pemanfaatan pelepah sawit sebagai pakan. Program tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial, termasuk tambahan pendapatan, pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik, penguatan kerja sama, dan potensi pengurangan biaya pada usaha perkebunan. Penguatan pendampingan, pelatihan manajemen, kesehatan ternak, pakan, pemasaran, dan pengawasan berkelanjutan diperlukan agar program lebih mandiri dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Implementasi Program, Desa Korporasi Sapi, Peternak, Koperasi, Kecamatan Air Kumbang.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian, khususnya subsektor peternakan, merupakan bagian penting dari pembangunan nasional karena berkaitan dengan penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Peternakan sapi potong memiliki posisi strategis karena daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani. Namun, sebagaimana diuraikan dalam tesis, pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional masih menghadapi persoalan produksi domestik, produktivitas ternak, akses pasar, serta kapasitas manajerial peternak skala kecil. Data yang digunakan dalam tesis menunjukkan bahwa kebutuhan daging sapi pada periode yang dirujuk mencapai sekitar 683,29 ribu ton,

sementara produksi sekitar 404,59 ribu ton sehingga terdapat defisit sekitar 278,70 ribu ton (Kementerian Pertanian, 2020).

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah ternak, tetapi juga dengan pola usaha peternak yang selama ini banyak dilakukan dalam skala kecil dan subsisten. Kementerian Pertanian kemudian mengembangkan pendekatan korporasi petani sebagai upaya meningkatkan skala ekonomi, integrasi usaha, pengelolaan hulu-hilir, dan kemampuan peternak untuk menjalankan usaha secara lebih modern. Program Seribu Desa Sapi yang kemudian dikenal sebagai Desa Korporasi Sapi diarahkan untuk mempercepat peningkatan populasi dan produksi sapi sekaligus meningkatkan

kesejahteraan peternak (Kementerian Pertanian, 2020).

Pada tahap awal, program dikembangkan di lima wilayah sebagai pilot project, kemudian pada 2021 berkembang menjadi sembilan kawasan, salah satunya Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Di Kabupaten Banyuasin, lokasi program berada di Kecamatan Air Kumbang dan melibatkan lima desa, yaitu Budi Mulya, Sido Makmur, Tirta Makmur, Panca Mulya, dan Muara Baru. Kelima wilayah tersebut tergabung dalam kelembagaan Koperasi Dekopi Aka Jaya. Program dirancang sebagai transformasi kelembagaan dari kelompok peternak menuju satu manajemen korporasi yang terintegrasi dan berorientasi pada keuntungan serta kesejahteraan peternak.

Kecamatan Air Kumbang dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah ini memiliki kegiatan perkebunan kelapa sawit yang luas dan potensi Hijauan Pakan Ternak (HPT). Pada rancangan awal, limbah sawit seperti pelepah, bungkil, dan solid diproyeksikan menjadi sumber pakan alternatif. Integrasi sapi dan kelapa sawit diharapkan dapat menghasilkan hubungan saling menguntungkan: limbah perkebunan dimanfaatkan sebagai input peternakan, sedangkan kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi tanaman. Penelitian Daud dan Suhartini (2022), sebagaimana dirujuk dalam tesis, juga menunjukkan adanya potensi pengembangan sapi potong yang diintegrasikan dengan

perkebunan kelapa sawit di kawasan DKS Air Kumbang.

Walaupun potensi wilayah cukup kuat, implementasi program tidak otomatis mencapai tujuan. Tesis menemukan bahwa pendapatan peternak masih bervariasi, bahkan terdapat kondisi usaha yang belum memberikan keuntungan. Permasalahan tersebut mendorong pentingnya kajian implementasi untuk melihat bagaimana program diterjemahkan menjadi kegiatan nyata, bagaimana aktor bekerja sama, serta apa saja hambatan yang muncul di tingkat lapangan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat menentukan karena pada tahap inilah tujuan normatif diterjemahkan ke dalam tindakan dan hasil. Program yang dirancang dengan baik dapat mengalami kesenjangan ketika diterapkan apabila komunikasi tidak berjalan, sumber daya tidak memadai, pelaksana kurang siap, atau struktur organisasi tidak mendukung. Dalam konteks DKS, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh bantuan sapi atau sarana yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan peternak dan organisasi mengelola ternak, pakan, kesehatan, pembiakan, pemasaran, pembukuan, dan kerja sama.

Penelitian ini menggunakan model George C. Edward III sebagai kerangka analisis implementasi. Model ini menempatkan empat variabel sebagai faktor penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan dan dipahami. Sumber daya berkaitan dengan manusia, finansial, informasi, kewenangan, serta fasilitas. Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana. Struktur birokrasi berkaitan dengan prosedur, pembagian tanggung jawab, dan koordinasi. Kerangka ini relevan karena DKS melibatkan banyak aktor dari pemerintah pusat hingga masyarakat desa.

Masalah penelitian yang menjadi dasar artikel ini adalah bagaimana implementasi Program Desa Korporasi Sapi di Kecamatan Air Kumbang, apa faktor pendukung dan penghambatnya, serta sejauh mana program memberikan manfaat bagi peternak dan masyarakat. Penelitian juga diarahkan untuk memahami kendala yang membuat program belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagai sentra produksi daging dan sebagai usaha yang meningkatkan kesejahteraan peternak.

Secara akademik, penelitian ini penting karena mempertemukan kajian implementasi kebijakan publik dengan pengembangan ekonomi peternakan berbasis kelembagaan korporasi. Program DKS bukan sekadar kegiatan distribusi bantuan, tetapi perubahan model pengelolaan usaha. Peternak yang sebelumnya mengelola ternak dalam jumlah terbatas harus beradaptasi dengan pengelolaan ternak dalam skala yang lebih besar dan

melalui satu manajemen koperasi. Perubahan tersebut membutuhkan kapasitas organisasi, perubahan perilaku, pembelajaran, dan pendampingan.

Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi, Koperasi Dekopi Aka Jaya, pemerintah desa, penyuluh, pendamping, dan kelompok peternak. Fokus perbaikan bukan hanya mempertahankan program, tetapi memperkuat kemampuan penerima manfaat agar setelah periode pendampingan mereka mampu mengelola usaha secara mandiri. Tesis mencatat bahwa pengembangan sapi dari pusat berlangsung sebagai investasi jangka panjang selama 2021–2024 dan setelah itu pembinaan diharapkan dilanjutkan oleh dinas kabupaten.

Dengan demikian, artikel ini memandang implementasi DKS sebagai proses yang dinamis. Keberhasilan program perlu dilihat dari kesesuaian lokasi dan sasaran, kualitas koordinasi, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, kekuatan kelembagaan, serta kemampuan mengatasi persoalan pakan, kesehatan, reproduksi, akses, dan pemasaran.

B. KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Publik, Organisasi, dan Manajemen

Administrasi publik berkaitan dengan proses pengorganisasian sumber daya dan personel publik untuk merumuskan,

mengimplementasikan, serta mengelola keputusan dan kebijakan publik. Chandler dan Plano dalam Keban memandang administrasi publik sebagai proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik. Dalam konteks DKS, perspektif ini penting karena program melibatkan pemerintah, koperasi, kelompok peternak, desa, penyuluh, pendamping, dan masyarakat. Keberhasilan program dengan demikian bergantung pada kemampuan mengoordinasikan berbagai sumber daya dan kepentingan.

Organisasi merupakan wadah kerja sama yang mempunyai tujuan, pembagian kerja, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Hasibuan menekankan bahwa organisasi merupakan perkumpulan formal yang terstruktur dari orang-orang yang bekerja sama untuk melakukan kegiatan. Dalam DKS, organisasi diwujudkan melalui Koperasi Dekopi Aka Jaya sebagai wadah kelembagaan yang menyatukan kelompok-kelompok peternak. Organisasi tersebut menjadi penting karena pengelolaan program tidak lagi hanya dilakukan oleh individu peternak, melainkan melalui sistem manajemen bersama.

Manajemen dapat dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen tersebut terlihat dalam kegiatan DKS mulai dari pengadaan dan pemeliharaan ternak, penyediaan pakan, pembagian tugas anggota, pencatatan

administrasi, pengelolaan keuangan, sampai pemasaran. Kelemahan manajerial yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan belum sepenuhnya diikuti perubahan kapasitas pengelolaan.

Konsep Program Desa Korporasi Sapi

Program Desa Korporasi Sapi merupakan program Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan populasi dan produksi sapi, mencukupi kebutuhan protein hewani, serta meningkatkan kesejahteraan peternak melalui pengembangan sapi berbasis korporasi petani (Kementerian Pertanian, 2020). Program ini mengandung tiga dimensi penting, yaitu kelembagaan dan skala usaha, pengembangan ternak, serta pakan.

Pada sisi kelembagaan, program berupaya mengubah usaha peternak kecil menjadi usaha kolektif yang memiliki skala ekonomi dan manajemen yang lebih terstruktur. Pada sisi ternak, program mengombinasikan sapi indukan dan sapi bakalan untuk mendukung pembiakan sekaligus produksi daging. Pada sisi pakan, program mendorong pemanfaatan sumber daya lokal seperti hijauan, limbah pertanian, dan limbah perkebunan yang dapat diolah dengan mekanisme.

Mekanisme program juga menempatkan bantuan sebagai stimulan, sehingga penerima manfaat tetap memberikan

kontribusi berupa pakan, lahan, kandang, alat, atau kebutuhan lain berdasarkan kesepakatan. Pola pemeliharaan dapat dilakukan secara semi intensif atau intensif, dengan perhatian pada kecukupan nutrisi. Konsep tersebut menuntut penerima manfaat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab atas keberlanjutan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor pelaksana dengan menggunakan sarana pendukung dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Purwanto dan Sulistyastuti menjelaskan implementasi sebagai kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan kebijakan. Pandangan ini menegaskan bahwa implementasi merupakan jembatan antara keputusan dan hasil yang diterima masyarakat.

George C. Edward III mengembangkan model implementasi dengan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi mempunyai indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Sumber daya mencakup staf, informasi, kewenangan, serta fasilitas. Disposisi berkaitan dengan sikap pelaksana, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan SOP dan fragmentasi atau pembagian

tanggung jawab. Model ini digunakan dalam tesis sebagai dasar untuk menganalisis DKS.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam proses implementasi Program Desa Korporasi Sapi, pengalaman para pelaksana, kondisi kelompok peternak, serta faktor pendukung dan penghambat di lapangan. Penelitian tidak diarahkan terutama untuk menguji hubungan statistik, tetapi untuk memperoleh pemahaman mengenai proses, interaksi, dan konteks implementasi.

Penelitian dilakukan di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebagai wilayah penerima Program Desa Korporasi Sapi. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena kecamatan tersebut merupakan lokasi pelaksanaan DKS di Kabupaten Banyuasin. Penelitian dilaksanakan pada minggu keempat Januari sampai minggu ketiga Februari 2025.

Informan berjumlah sembilan orang dan dipilih berdasarkan kemampuan serta pengalaman memberikan informasi tentang implementasi program. Informan terdiri dari satu Kepala Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin, satu staf dinas, satu Ketua Koperasi Dekopi Aka Jaya, satu Pendamping DKS, satu

Ketua Kelompok Desa Korporasi, satu anggota kelompok, satu penyuluh pertanian, dan dua warga sekitar. Komposisi ini memberikan perspektif dari unsur pemerintah, pengelola kelembagaan, pelaksana teknis, penerima manfaat, serta masyarakat.

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan media review. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari informan terkait proses implementasi. Wawancara menggunakan format terstruktur dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu, tetapi peneliti tetap membuka kemungkinan munculnya pertanyaan lanjutan untuk menggali informasi yang lebih mendalam.

Observasi dilakukan secara langsung dan berulang terhadap pelaksanaan DKS di lokasi penelitian. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder dan dokumentasi kegiatan, termasuk susunan kerja dan daftar hadir anggota. Media review dilakukan terhadap pemberitaan media cetak maupun daring yang berkaitan dengan implementasi DKS.

Fokus analisis menggunakan kerangka implementasi George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian memperhatikan standar dan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan, serta kendala implementasi sebagaimana dikembangkan dalam pembahasan tesis.

Analisis data mengikuti Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Kondensasi dilakukan dengan memilih, memfokuskan, meringkas, dan mentransformasikan data. Data kemudian disajikan untuk melihat pola dan hubungan. Kesimpulan ditarik setelah data diverifikasi.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan yang berbeda dan mencocokkannya dengan dokumen. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan pengecekan berulang pada waktu yang berbeda. Pendekatan tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Kerangka analisis penelitian menempatkan Program Desa Korporasi Sapi sebagai kebijakan/program yang diimplementasikan melalui empat unsur utama. Pertama, komunikasi untuk melihat bagaimana tujuan, aturan, dan permasalahan disampaikan. Kedua, sumber daya untuk melihat kemampuan manusia dan finansial serta fasilitas yang tersedia. Ketiga, disposisi untuk melihat komitmen dan sikap pelaksana. Keempat, struktur birokrasi untuk melihat pembagian kerja dan koordinasi.

Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri. Komunikasi yang baik membutuhkan

sumber daya dan struktur yang memungkinkan informasi bergerak. Sumber daya yang tersedia membutuhkan pelaksana yang mempunyai disposisi positif. Disposisi yang baik perlu didukung struktur kelembagaan agar komitmen individual menjadi kinerja organisasi. Dalam DKS, interaksi keempat aspek tersebut menentukan apakah bantuan dan kebijakan dapat berubah menjadi usaha peternakan yang produktif.

Kecamatan Air Kumbang memiliki luas sekitar 340,46 km² dan terdiri atas 16 desa. Berdasarkan data BPS Kabupaten Banyuasin yang digunakan dalam tesis, jumlah penduduk Kecamatan Air Kumbang tercatat 28.013 jiwa pada data tahun 2023. Kondisi wilayah dan kegiatan ekonomi setempat penting karena DKS dikembangkan dalam lingkungan masyarakat yang banyak berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit.

Program DKS dilaksanakan pada lima desa, yaitu Budi Mulya, Sido Makmur, Tirta Makmur, Panca Mulya, dan Muara Baru. Kelima kelompok yang tergabung dalam Koperasi Dekopi Aka Jaya adalah Karya Muda, Makmur Barokah, Tunas Mandiri, Cemerlang, dan Jaya Bersama. Koperasi tersebut berdiri berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 19 Oktober 2021 dan mempunyai badan hukum yang tercatat dalam dokumen penelitian.

Dokumen Business Plan Koperasi Dekopi Aka Jaya tahun 2023 menunjukkan adanya aset berupa tanah kandang, tanah HPT, kandang penggemukan, kandang pengembangan, gudang pakan, bangunan limbah, mesin pengolah pakan, timbangan, pompa air, instalasi biogas, kendaraan roda tiga, dan alat pengolah pupuk organik. Ketersediaan aset tersebut menunjukkan bahwa program memiliki basis fisik untuk dikembangkan, meskipun pemanfaatan seluruh aset tetap membutuhkan kapasitas pengelolaan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standar dan Sasaran Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran DKS di Kecamatan Air Kumbang pada dasarnya sudah tepat. Wilayah mempunyai potensi pengembangan sapi karena tersedianya HPT dan sumber pakan lokal. Pemilihan kawasan perkebunan sawit juga didasarkan pada gagasan integrasi usaha. Program diarahkan kepada petani atau peternak yang pernah beternak atau bersedia bergabung dan menjalankan tanggung jawab pemeliharaan.

Tujuan program sebagaimana dirangkum dari wawancara adalah meningkatkan produksi daging sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, meningkatkan pendapatan peternak,

memanfaatkan limbah sawit dan limbah ternak, serta membangun kerja sama kelompok melalui satu manajemen koperasi. Program juga diharapkan dapat menekan biaya perkebunan melalui pemanfaatan rumput dan pupuk organik dari kotoran ternak.

Kesesuaian lokasi menjadi kekuatan awal implementasi. Akan tetapi, kesesuaian potensi tidak otomatis menghasilkan keberhasilan. Rencana pemanfaatan pelepah sawit sebagai pakan alternatif ternyata belum dapat diterapkan karena sapi tidak mau memakannya dan proses pencacahan masih menyisakan duri halus. Dengan demikian, salah satu asumsi penting desain program belum berjalan sesuai harapan.

2. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi antar pihak dinilai berjalan baik melalui kunjungan, pelatihan, rapat koordinasi, dan komunikasi virtual. Pelaksanaan melibatkan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD/Balai Penelitian BPTU Sembawa, dinas peternakan provinsi dan kabupaten, kecamatan, desa, koperasi, pendamping, PPL, serta kelompok pelaksana. Rapat koordinasi dan kunjungan lapangan menjadi media untuk menyampaikan perkembangan program.

Namun, terdapat sisi komunikasi yang belum optimal, yaitu komunikasi dari anggota kelompok kepada pembina. Informan menyebutkan bahwa anggota masih kurang

aktif bertanya dan menyampaikan persoalan. Akibatnya, masalah yang dihadapi anggota belum tentu seluruhnya diketahui pembina. Komunikasi paling intensif cenderung berlangsung dengan PPL sebagai penghubung utama.

Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi program telah baik pada arah koordinasi kelembagaan, tetapi komunikasi dua arah dari tingkat penerima manfaat masih perlu diperkuat. Penggunaan grup WhatsApp sudah tersedia dan dapat menjadi media penyampaian masalah secara cepat. Namun, keberadaan media belum cukup tanpa keberanian, motivasi, dan kebiasaan anggota untuk menggunakannya.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana secara umum tergolong baik. Dukungan pemerintah terhadap DKS terlihat dari keterlibatan dinas dan keberadaan pendampingan. Kekuatan organisasi juga dinilai cukup baik. Namun, tesis menekankan perlunya pengawasan pemerintah yang lebih sering. Pengawasan penting bukan hanya untuk memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan, tetapi juga untuk mengidentifikasi masalah teknis dan manajerial sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Agen pelaksana DKS memiliki peran yang berbeda. Pemerintah berperan sebagai pembina dan pendukung kebijakan, koperasi sebagai wadah pengelolaan bersama,

pendamping membantu penguatan kapasitas, PPL membantu aspek penyuluhan, desa mendukung lahan dan perizinan, sedangkan kelompok peternak menjalankan kegiatan pemeliharaan. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa program mempunyai karakter kolaboratif.

4. Sumber Daya

Sumber daya finansial kelompok menunjukkan dukungan yang cukup baik. Anggota mengeluarkan dana untuk pembangunan kandang, pemeliharaan, dan pembelian pakan. Temuan ini penting karena program dirancang sebagai usaha yang membutuhkan kontribusi penerima manfaat, bukan hanya mengandalkan bantuan pemerintah.

Dari sisi sumber daya manusia, anggota tidak diwajibkan mempunyai tingkat pendidikan tinggi. Yang ditekankan adalah komitmen, pengalaman beternak, kemauan maju, dan kesediaan bekerja keras. Pengurus idealnya merupakan anggota yang aktif, memahami administrasi, jujur, berpengalaman, dapat mengayomi, dan jika memungkinkan berpendidikan minimal SLTA. Pendamping diutamakan berpendidikan S1, memahami administrasi dan pembukuan, memahami masalah ternak, mudah dihubungi, serta rajin melakukan kontrol.

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa DKS membutuhkan kombinasi kemampuan teknis peternakan dan kemampuan manajemen. Masalah utama bukan semata-mata rendahnya pendidikan, tetapi keterbatasan pengalaman mengelola usaha dalam skala korporasi. Peternak yang sebelumnya terbiasa mengelola satu atau dua ekor harus beradaptasi dengan skala usaha yang lebih besar dan dengan kewajiban administrasi serta pembukuan.

Karena itu, pelatihan manajemen menjadi kebutuhan penting. Keterampilan pengelolaan pakan, pencatatan biaya, kesehatan ternak, reproduksi, pemasaran, dan pembukuan harus berjalan bersama. Pendampingan tidak cukup hanya diberikan pada awal program, tetapi perlu dilanjutkan sampai kelompok mampu mengelola usaha secara mandiri.

5. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana DKS menunjukkan kecenderungan positif. Desa memberikan dukungan berupa peminjaman lahan untuk kandang dan HPT. Pendamping menyebut bahwa sebagian besar kandang dan lahan HPT merupakan milik desa yang diizinkan untuk dipinjam pakai selama sepuluh tahun. Dukungan ini memberikan kepastian penggunaan lahan dan memperlihatkan komitmen pemerintah desa terhadap program.

Pelaksana juga menyadari adanya keterbatasan kemampuan manajerial. Pengakuan tersebut tidak semata-mata menunjukkan kelemahan, tetapi juga keterbukaan untuk memperoleh pembinaan dan pelatihan. Staf dinas yang diwawancarai menyampaikan tanggung jawab terhadap program sekaligus mengakui kebutuhan pembinaan lebih lanjut. Dalam perspektif Edward III, sikap terbuka dan komitmen seperti ini merupakan modal penting bagi keberlanjutan implementasi.

Namun, disposisi positif harus diikuti penguatan kapasitas. Semangat anggota tidak cukup apabila persoalan teknis, kesehatan ternak, reproduksi, pakan, dan pemasaran tidak mendapatkan solusi. Beberapa kegagalan inseminasi buatan bahkan dapat menurunkan semangat kelompok karena ternak terus membutuhkan pakan tanpa menghasilkan anak sapi sesuai harapan.

6. Struktur Kelembagaan dan Koordinasi

Struktur kelembagaan DKS diwujudkan melalui Koperasi Dekopi Aka Jaya yang menghimpun lima kelompok. Model ini sesuai dengan tujuan program untuk mengubah kelompok-kelompok kecil menjadi satu sistem manajemen. Koperasi berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pengelolaan kegiatan ekonomi bersama.

Struktur tersebut memperlihatkan pembagian peran antara pemerintah, desa, koperasi, kelompok, pendamping, dan

penyuluh. Koordinasi antar pihak dinilai berjalan baik, terutama dalam pembesaran, pemeliharaan, dan kesehatan hewan. Namun, koordinasi dengan anggota masih perlu diperbaiki karena tidak semua persoalan tersampaikan kepada pembina.

Kekuatan struktur organisasi akan lebih bermakna apabila informasi lapangan dapat bergerak secara cepat dan keputusan dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pelaporan, pencatatan kesehatan ternak, pencatatan reproduksi, pembukuan, dan pemasaran menjadi bagian penting dari penguatan kelembagaan.

7. Implementasi dan Pencapaian Tujuan

Jika seluruh temuan digabungkan, implementasi DKS dapat dikatakan berjalan tetapi belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan sebagai sentra produksi daging. Penelitian menemukan adanya potensi wilayah, dukungan pemerintah, komunikasi yang relatif baik, kontribusi anggota, dan kelembagaan koperasi. Namun, hasil produksi dan keberlanjutan usaha masih menghadapi kendala teknis dan ekonomi.

8. Kendala Pakan dan Kondisi Alam

Ketersediaan pakan merupakan salah satu persoalan penting. Pada musim penghujan, lahan rumput dapat mengalami banjir, sedangkan pada musim kemarau rumput sulit diperoleh. Kondisi tersebut meningkatkan biaya pakan dan mengganggu

stabilitas pemeliharaan. Rencana memanfaatkan pelepah sawit sebagai pakan alternatif juga belum berhasil karena sapi tidak mau memakannya dan masih terdapat duri halus setelah pencacahan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain program dan adaptasi teknis di lapangan. Secara konsep, integrasi sapi-sawit menawarkan sumber pakan lokal yang menarik. Akan tetapi, inovasi pakan harus mempertimbangkan penerimaan ternak, keamanan, proses pengolahan, kualitas nutrisi, dan efisiensi biaya. Dengan demikian, kegagalan satu jenis pakan tidak berarti konsep integrasi harus ditinggalkan, tetapi diperlukan penyesuaian teknologi dan formulasi.

9. Kendala Kesehatan dan Reproduksi

Kesehatan ternak menjadi kendala lain. Informan menyebutkan bahwa ketika sapi sakit tidak selalu tersedia tenaga kesehatan hewan di lokasi. Keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko kerugian dan menambah beban pemeliharaan. Dalam program yang mengelola ternak secara kolektif, sistem kesehatan ternak harus dirancang sebagai layanan rutin, bukan hanya respons terhadap kejadian.

Kendala reproduksi juga signifikan. Sebagian besar sapi indukan yang telah dilakukan Inseminasi Buatan (IB) tidak berhasil bunting. Kegagalan tersebut

menyebabkan biaya pakan dan pemeliharaan terus berjalan tanpa tambahan populasi. Secara ekonomi, keberhasilan pembiakan merupakan salah satu indikator penting karena tujuan program bukan hanya mempertahankan ternak, tetapi meningkatkan populasi dan produksi.

10. Kendala Akses dan Pemasaran

Akses jalan yang rusak menjadi hambatan dalam mobilitas, distribusi, dan pemasaran. Kondisi ini meningkatkan biaya dan waktu perjalanan. Masalah pemasaran juga muncul karena belum terbentuk jaringan pasar dan mitra yang kuat. Kelompok harus bersaing dengan peternak lain yang telah lebih dahulu memiliki jaringan pasar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hulu-hilir program belum sepenuhnya terwujud. Pengembangan ternak tanpa jaringan pasar dapat menimbulkan ketidakpastian pendapatan. Kelembagaan koperasi seharusnya dapat digunakan untuk memperkuat posisi tawar melalui pemasaran kolektif, pemetaan pembeli, kerja sama dengan mitra, dan perencanaan waktu penjualan.

11. Manfaat Program

Walaupun belum mencapai tujuan produksi secara optimal, program memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat. Manfaat tersebut meliputi tambahan penghasilan, pengurangan pengangguran, pengisian waktu

luang, meningkatnya komunikasi dan kerja sama antaranggota, serta tersedianya sumber pupuk organik dari kotoran sapi. Bagi petani sawit, pupuk organik dari kotoran sapi menjadi nilai tambah ketika pupuk kimia sulit diperoleh atau tidak lagi mendapatkan subsidi.

12. Integrasi Peternakan dan Perkebunan

Konsep integrasi merupakan salah satu nilai strategis DKS Air Kumbang. Kawasan perkebunan sawit menyediakan potensi bahan pakan, sedangkan ternak menghasilkan kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Secara konseptual, hubungan tersebut dapat menciptakan efisiensi dan sirkularitas sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebaliknya, pemanfaatan pelepah sawit sebagai pakan belum berhasil. Hal ini memperlihatkan bahwa integrasi tidak cukup dengan mengidentifikasi potensi limbah, tetapi memerlukan teknologi pengolahan yang tepat dan penerimaan ternak. Ketersediaan bahan tidak sama dengan ketersediaan pakan yang layak konsumsi. Oleh sebab itu, aspek teknologi pengolahan dan uji coba pakan menjadi bagian yang perlu diperkuat.

13. Analisis dengan Model Edward III

Pertama, dari aspek komunikasi, implementasi relatif mendukung. Koordinasi dilakukan melalui kunjungan, pelatihan, rapat,

dan komunikasi virtual. Akan tetapi, komunikasi dari anggota kepada pembina belum optimal. Kondisi ini menyebabkan masalah lapangan berpotensi terlambat diketahui. Dalam kerangka Edward III, transmisi sudah berjalan, tetapi efektivitas komunikasi dua arah masih perlu ditingkatkan.

Kedua, dari aspek sumber daya, program mempunyai dukungan finansial anggota dan aset fisik yang cukup beragam. Namun, kapasitas sumber daya manusia terutama manajemen masih terbatas. Persoalan pakan, kesehatan, reproduksi, dan pemasaran juga menunjukkan bahwa sumber daya teknis belum sepenuhnya kuat. Karena itu, penguatan SDM dan layanan teknis menjadi prioritas.

Ketiga, disposisi pelaksana relatif baik. Desa, dinas, pendamping, pengurus, dan anggota menunjukkan komitmen terhadap program. Sikap terbuka terhadap pelatihan menjadi modal untuk perbaikan. Akan tetapi, komitmen perlu dijaga dengan hasil yang nyata agar anggota tidak kehilangan motivasi ketika menghadapi kegagalan reproduksi atau tingginya biaya pakan.

Keempat, struktur birokrasi dan kelembagaan cukup baik karena telah terbentuk Koperasi Dekopi Aka Jaya dan terdapat pembagian peran. Koordinasi antarlembaga berjalan. Namun, pengawasan dan pendampingan perlu dipertahankan agar struktur formal tersebut menghasilkan kinerja yang konsisten.

14. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama adalah kesesuaian potensi wilayah, dukungan pemerintah, dukungan pemerintah desa, kontribusi finansial anggota, keberadaan koperasi, komunikasi antarinstansi, serta semangat pelaksana. Potensi HPT dan integrasi dengan perkebunan sawit memberikan dasar ekonomi bagi pengembangan.

15. Faktor Penghambat

Faktor penghambat meliputi jalan rusak, banjir dan kekeringan, kegagalan pemanfaatan pelepah sawit, belum kuatnya jaringan pasar dan mitra, keterbatasan layanan kesehatan hewan, serta tingginya kegagalan IB. Faktor-faktor tersebut saling terkait dan dapat memengaruhi pendapatan serta motivasi anggota.

16. Implikasi terhadap Pendapatan Peternak

Kerangka pemikiran tesis menempatkan implementasi DKS melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi sebagai faktor yang pada akhirnya berhubungan dengan pendapatan. Dalam usaha peternakan, pendapatan pada dasarnya merupakan selisih antara penerimaan dan biaya. Soekartawi menjelaskan bahwa penerimaan dapat dihitung dari jumlah output

dikalikan harga, sedangkan pendapatan merupakan penerimaan dikurangi biaya total.

Dalam konteks DKS, biaya tidak hanya berasal dari pembelian ternak, tetapi juga pakan, pemeliharaan, kesehatan, tenaga kerja, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Apabila pakan menjadi mahal karena kekeringan atau gagal memanfaatkan limbah sawit, maka biaya meningkat. Jika IB gagal atau kesehatan ternak terganggu, penerimaan yang diharapkan tertunda. Jika pasar belum tersedia, ternak yang siap dijual belum tentu segera menghasilkan penerimaan yang optimal.

Penelitian ini mencatat adanya dinamika kas koperasi, termasuk pembelian kembali ternak pada Juli 2023 oleh kelompok Cemerlang sebanyak 38 ekor dan kelompok Karya Muda sebanyak lima ekor. Informasi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi ternak memang berlangsung, tetapi keberlanjutan usaha membutuhkan pengelolaan arus kas yang baik. Koperasi perlu membedakan dana operasional, modal, hasil penjualan, dan kewajiban anggota agar keputusan usaha dapat dibuat berdasarkan kondisi keuangan yang nyata.

17. Kelembagaan sebagai Instrumen Keberlanjutan

Koperasi Dekopi Aka Jaya menjadi instrumen penting dalam perubahan pola usaha

dari individu atau kelompok kecil menjadi satu manajemen. Kelembagaan memungkinkan pengadaan input, pencatatan, pemasaran, dan pembagian tanggung jawab dilakukan secara kolektif. Namun, kelembagaan tidak otomatis kuat hanya karena telah memiliki badan hukum. Kekuatan kelembagaan bergantung pada kualitas tata kelola, transparansi, kapasitas pengurus, partisipasi anggota, dan kemampuan menghasilkan manfaat.

Karena itu, penguatan koperasi perlu diarahkan pada pembukuan, perencanaan bisnis, pengadaan pakan, pemasaran kolektif, pengelolaan aset, dan sistem informasi ternak. Pendampingan dengan kemampuan administrasi dan pembukuan menjadi penting. Pelatihan manajemen yang berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.

18. Strategi Penguatan Program

Pertama, pendampingan perlu dilanjutkan secara berkala, terutama pada aspek manajemen, pembukuan, pakan, kesehatan, dan reproduksi. Kedua, pemerintah perlu memperkuat layanan kesehatan hewan di kawasan DKS. Ketiga, diperlukan inovasi pakan alternatif melalui pengolahan yang aman dan sesuai dengan penerimaan ternak. Keempat, koperasi perlu membangun jaringan pemasaran dengan pembeli dan mitra usaha.

Kelima, komunikasi dua arah perlu diperkuat dengan mekanisme pelaporan sederhana. Anggota dapat menyampaikan

masalah melalui grup komunikasi atau saat kunjungan. Keenam, pengawasan perlu diarahkan pada indikator hasil, seperti perkembangan populasi, kesehatan, keberhasilan reproduksi, biaya pakan, volume penjualan, dan perubahan pendapatan. Ketujuh, pemerintah desa dan dinas perlu menjaga keberlanjutan dukungan setelah periode bantuan pusat berakhir.

19. Model Implementasi DKS yang Berkelanjutan

Berdasarkan temuan penelitian, keberlanjutan DKS dapat dipahami sebagai suatu siklus yang menghubungkan potensi wilayah, kelembagaan, kapasitas SDM, produksi, pengolahan input, kesehatan ternak, reproduksi, pemasaran, dan pendapatan. Potensi wilayah menjadi modal awal, tetapi harus diterjemahkan menjadi sistem produksi yang efisien. Koperasi menjadi penghubung antara peternak dengan pemerintah dan pasar. Pendampingan menjadi mekanisme pembelajaran, sedangkan pengawasan menjadi mekanisme koreksi.

Model tersebut menempatkan peternak sebagai subjek, bukan sekadar penerima bantuan. Bantuan sapi, kandang, mesin, dan fasilitas merupakan modal awal. Setelah itu, keberhasilan ditentukan oleh kemampuan anggota mengelola aset, menanggung sebagian biaya, menjaga kesehatan ternak, mengatur pakan, melakukan pembiakan, dan menjual ternak. Perubahan dari pola subsisten ke pola

korporasi membutuhkan waktu sehingga pembinaan berkelanjutan menjadi bagian dari desain program.

20. Pembelajaran Kebijakan

Pelajaran pertama dari implementasi DKS Air Kumbang adalah pentingnya kesesuaian desain program dengan kondisi lokal. Wilayah perkebunan sawit memang menawarkan potensi integrasi, tetapi teknologi pemanfaatan limbah harus diuji sebelum menjadi asumsi utama. Pelajaran kedua adalah pentingnya kapasitas manajerial. Peternak yang mempunyai pengalaman memelihara sapi belum tentu siap mengelola usaha dalam skala korporasi.

Pelajaran ketiga adalah bahwa keberhasilan produksi harus diikuti keberhasilan pasar. Jaringan pasar bukan tahap akhir yang dapat dibangun setelah produksi meningkat, tetapi perlu dirancang sejak awal. Pelajaran keempat adalah pentingnya layanan kesehatan dan reproduksi. Kegagalan IB dan keterbatasan tenaga kesehatan dapat mengganggu keseluruhan siklus bisnis.

Pelajaran kelima adalah perlunya komunikasi dua arah. Koordinasi pemerintah yang baik belum cukup jika anggota penerima manfaat pasif menyampaikan masalah. Pemberdayaan berarti meningkatkan kemampuan anggota untuk bertanya,

melaporkan, mengambil keputusan, dan belajar.

21. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi program pertanian berbasis korporasi membutuhkan kombinasi antara kebijakan publik dan manajemen usaha. Model Edward III membantu menjelaskan sisi implementasi, sementara data lapangan memperlihatkan bahwa output program dipengaruhi oleh faktor teknis peternakan dan kondisi pasar. Dengan demikian, evaluasi program perlu menggabungkan dimensi administratif, kelembagaan, teknis, sosial, dan ekonomi.

Temuan penelitian juga memperkuat pentingnya peran pemerintah daerah setelah dukungan pusat berakhir. Kesimpulan tesis menyarankan agar dinas terkait tetap melakukan pengawasan dan pendampingan serta memberikan pelatihan untuk mendukung dan memotivasi anggota. Rekomendasi tersebut relevan karena keberlanjutan DKS bergantung pada kemampuan kelompok untuk menjadi mandiri.

Secara keseluruhan, DKS Air Kumbang mempunyai fondasi yang baik berupa potensi wilayah, dukungan pemerintah, kelembagaan koperasi, kontribusi anggota, dan komunikasi antar pihak. Namun, tujuan produksi dan kesejahteraan belum tercapai

secara optimal karena kendala pakan, kesehatan, reproduksi, akses, dan pemasaran. Implementasi karena itu dapat dinilai telah berjalan tetapi masih memerlukan penguatan agar menghasilkan dampak ekonomi yang lebih stabil.

E. KESIMPULAN

Program Desa Korporasi Sapi di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi merupakan program yang relevan dengan potensi wilayah dan kebutuhan pengembangan peternakan sapi. Pemilihan lokasi dinilai tepat karena terdapat HPT dan kawasan perkebunan kelapa sawit yang berpotensi mendukung integrasi peternakan dan perkebunan. Program dilaksanakan melalui lima kelompok yang tergabung dalam Koperasi Dekopi Aka Jaya dan diarahkan untuk meningkatkan produksi daging, pendapatan peternak, kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya lokal.

Implementasi program dari aspek komunikasi berjalan relatif baik. Komunikasi dilakukan melalui kunjungan, pelatihan, rapat koordinasi, komunikasi virtual, dan hubungan dengan PPL. Namun, komunikasi dari anggota kepada pembina masih perlu diperkuat karena sebagian masalah belum tersampaikan. Dari aspek sumber daya, dukungan finansial anggota cukup baik dan tersedia berbagai aset fisik, tetapi kemampuan manajerial sumber daya manusia masih membutuhkan pelatihan

dan pendampingan. Dari aspek disposisi, pelaksana menunjukkan sikap dan komitmen yang baik, termasuk dukungan pemerintah desa dan kesediaan menerima pembinaan. Dari aspek struktur kelembagaan, Koperasi Dekopi Aka Jaya telah menjadi wadah satu manajemen bagi kelompok-kelompok penerima manfaat.

Meskipun demikian, implementasi belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagai sentra produksi daging. Hambatan utama meliputi kondisi jalan yang rusak, banjir pada musim hujan, kekeringan dan keterbatasan rumput pada musim kemarau, belum berhasilnya pemanfaatan pelepah sawit sebagai pakan, keterbatasan tenaga kesehatan hewan, kegagalan sebagian inseminasi buatan, serta belum kuatnya jaringan pasar dan mitra. Hambatan tersebut berpengaruh terhadap biaya pemeliharaan, perkembangan populasi, pemasaran, dan pendapatan.

Program tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain potensi tambahan pendapatan, program memperkuat kerja sama anggota, menyediakan aktivitas ekonomi, mendukung pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik, serta berpotensi mengurangi biaya tertentu pada usaha perkebunan. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya diukur dari penjualan sapi, tetapi juga dari terciptanya hubungan integratif antara peternakan, perkebunan, dan kelembagaan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan DKS perlu diarahkan pada keberlanjutan pendampingan, pelatihan

manajemen dan pembukuan, penguatan kesehatan serta reproduksi ternak, pengembangan pakan alternatif yang benar-benar dapat diterapkan, pembangunan jaringan pasar, peningkatan komunikasi dua arah, dan pengawasan berkala. Pendekatan tersebut diperlukan agar kelompok mampu bergerak dari ketergantungan terhadap bantuan menuju usaha korporasi peternakan yang mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono. (2010). Implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn. Jakarta: Rajawali Press.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi konsep implementasi kebijakan: Perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Jurnal Baca*, 1.
- Anggraeni, I. D. (2019). Persepsi petani terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Universitas Sjakhyakirti, Palembang.
- Arif Rohman. (2009). Memahami pendidikan dan ilmu pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik peternakan Indonesia. Jakarta: BPS.
- Daryanto. (2011). Manajemen pemasaran: Sari kuliah. Bandung: Satu Nusa.
- Daud, & Suhartini. (2022). Program/analisis potensi pengembangan sapi potong-integrasi dengan perkebunan kelapa sawit pada Desa Korporasi Sapi di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Palembang.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin. (2022). Rencana aksi (action plan) pengembangan Desa Korporasi Sapi Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Banyuasin.
- Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuasin. (2023). Laporan tahun 2023 perkembangan Desa Korporasi Sapi Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Banyuasin.
- Edward III, G. C. (1990). Public policy implementing. London: Jai Press Inc.
- Grindle, M. S. (2002). Teori dan proses kebijakan publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Handoko, T. H. (2009). Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini Usman. (2006). Manajemen, teori, praktik dan riset pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2008). Enam dimensi strategis administrasi publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Program 1.000 Desa Sapi/Desa Korporasi Sapi dan laporan terkait pengembangan peternakan. Jakarta.
- Koperasi Dekopi Aka Jaya. (2023). Business plan Koperasi Dekopi Aka Jaya Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Banyuasin.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang peningkatan produksi sapi dan kerbau

- Purwanto, & Sulistyastuti. (1991). Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ripley. (1986). Policy implementation and bureaucracy. Chicago: The Dorsey Press.
- Sabatier, P. (1986). Top down and bottom up approaches to implementation research. *Journal of Public Policy*, 6.
- Sagala, S. (2009). Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Soekartawi. (1985). Analisis usahatani. Jakarta: UI Press.
- Soekartawi. (2001). Pengantar agroindustri. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhaema, et al. (2014). Pengembangan wilayah peternakan sapi potong berbasis kesesuaian fisik lingkungan dan kesesuaian lahan untuk pakan di Kabupaten Cianjur.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin.
- Wahyuni, R., & Aldillah, R. (2021). Potential animal feed resources based on food crop waste supports development of beef cattle in West Sumatera, Indonesia.
- Winarno, B. (2005). Teori dan proses kebijakan publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wiyansyah, Y. A. (2022). Pola pengembangan pupuk organik kotoran ternak sapi terhadap pendapatan dan kontribusinya terhadap petani kelompok UPPO di Desa Kumbang Padang Permata Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Universitas Sjakhyakirti, Palembang.

